

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang yang telah diresmikan oleh Menteri PUPR, M. Basoeki Hadimoeljono, pada tanggal 31 Agustus 2015 lalu bertujuan untuk membangun pembangkit listrik yang menghasilkan daya sebesar 110 megawatt, menyuplai air baku, dan irigasi sekitar 90.000 ha areal persawahan di kawasan Sumedang Timur. Selain tujuan tersebut, di sekitar kawasan ini juga rencananya akan dikembangkan sektor kepariwisataan yang bertujuan untuk menarik wisatawan lokal. Rencana ini tentu akan berkontribusi terhadap perkembangan sektor perekonomian masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar Wado dan Darmaraja yang lokasinya berdekatan langsung dengan kawasan Waduk Jatigede.

Pengembangan sektor perekonomian dapat membuka potensi lapangan usaha baru yang dapat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Potensi-potensi lapangan usaha yang akan dikembangkan dapat mengakomodir kemampuan dan tingkat pendidikan yang dimiliki warga masyarakat. Peluang ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sehingga peluang-peluang dalam mengembangkan potensi usaha dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pembangunan di daerahnya yang berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan sektor perekonomian berbasis masyarakat sekitar ini harus benar-benar memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki masyarakat sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Masyarakat diharapkan tidak menjadi penonton dalam mengembangkan geliat perekonomian pembangunan daerahnya, tetapi menjadi aktor utama dalam mengembangkan sektor ekonominya.

Peran aktif masyarakat sebagai aktor utama dalam membangun perekonomian daerahnya perlu didukung oleh kesiapan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Hal ini sangat penting, karena sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kreativitas dalam melihat dan memanfaatkan peluang untuk menggali dan mengelola potensi lingkungan dan ekonomi secara optimal.

“Oleh sebab itu untuk kepentingan akselerasi suatu pembangunan di bidang apapun, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu prasyarat utama” (Notoatmodjo, 2009, hal. 1).

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci sukses pembangunan suatu daerah, karena dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya alam secara efektif, efisien, memiliki nilai ekonomis dan daya saing yang tinggi. Ada tiga faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam tabel indeks pembangunan manusia (IPM) dan komponen-komponennya yang dirilis pada tahun 2015 oleh badan PBB urusan pembangunan (UNDP), Indonesia menempati peringkat 110 dari 188 negara dengan nilai indeks 0,684. Hal ini masih tertinggal oleh beberapa negara ASEAN lainnya seperti Singapura yang menempati peringkat ke 11, Brunei Darussalam peringkat ke 31, Malaysia peringkat ke 62, dan Thailand peringkat ke 93. Tetapi masih unggul bila dibandingkan dengan negara Filipina yang menempati peringkat ke 115, Vietnam peringkat ke 116, dan Timor Leste peringkat ke 133 (UNDP, 2015, hal. 208-211).

Selain itu, berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 31 Desember 2015 lalu merupakan tantangan yang mendorong masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas agar memiliki daya saing yang memadai sehingga dapat bersaing dengan sumber daya manusia dari negara-negara ASEAN. “Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ME-ASEAN) pada tahun 2015 pada intinya adalah tidak ada lagi hambatan terhadap arus barang dan jasa, manusia dan modal antara negara-negara anggota ASEAN” (Tambunan, 2013, hal. 1). Senada dengan Wahyuti (2015, hal. 26) yang mengungkapkan bahwa,

Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN.

Untuk mengantisipasi dampak MEA dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka diperlukan sebuah upaya yang tepat. “Upaya paling

strategis bagi peningkatan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi negara dan bangsa Indonesia” (Zulrahman, 2013, hal. 1124-1125). Sedangkan menurut Muhmidayeli (2011, hal. 122) mengemukakan bahwa

Pengembangan sumber daya manusia berkenaan dengan proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk meningkatkan kemampuan-kemampuannya agar ia dapat berbuat dan berkeaktivitas sesuai dengan harapan yang dalam dunia pendidikan selalu dimaknai dengan terbentuknya kepribadian mandiri yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, potensi kemampuan-kemampuan dan kreativitas yang dimiliki serta kemandirian individu dapat dioptimalkan. Optimalisasi potensi-potensi tersebut dapat membuka peluang individu dalam mendapatkan pekerjaan ataupun berwirausaha yang berimplikasi terhadap penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperbaiki kesejahteraan individu-individu tersebut. “Oleh karena itu, kemampuan tersebut wajib dikembangkan secara sengaja melalui pendidikan yang terencana dan terarah melalui pengembangan sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya, dalam hal ini meliputi pendidikan keluarga (informal), di masyarakat (non formal) dan di sekolah (formal)”(Sumaatmadja, 2012, hal. 3).

Dunia pendidikan, dalam hal ini sekolah, memegang peran vital dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. “Sekolah berperan besar dalam pengembangan berbagai aspek dari anak didik, apalagi dengan kondisi yang seperti sekarang, yaitu untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia, tentu saja sekolah menjadi ujung tombak dan mempunyai peran yang sangat strategis” (Zulrahman, 2013, hal. 1125). Sekolah, khususnya pendidikan dasar dan menengah yang ada di wilayah Wado, harus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mereka dapat menggali dan mengelola potensi ekonomi sekaligus berpartisipasi dalam merintis dan mengembangkan usaha di lingkungan sekitar waduk Jatigede.

Mengamati fenomena yang terjadi di SMPN 2 Wado yang berkaitan dengan kondisi jumlah lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan jumlah peserta didik yang mengalami putus sekolah, hal ini

merupakan masalah yang memprihatinkan dan bertolak belakang dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ingin dicapai pemerintah melalui pendidikan di sekolah. Seperti tercantum dalam tujuan umum pendidikan bahwa “tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut” (BSNP, 2006, hal. 9). Tujuan pendidikan menengah yang dirumuskan tersebut pada kenyataannya belum menjadi perhatian serius masyarakat, orang tua, dan peserta didik khususnya di wilayah Wado. Indikasinya dapat dilihat pada tabel jumlah lulusan dan tabel peserta didik putus sekolah SMPN 2 Wado Kab. Sumedang berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Lulusan Peserta Didik SMPN 2 Wado Kab. Sumedang
Tahun Pelajaran 2011/2012 – 2015/2016

Tahun Ajaran	2011/2012		2012/2013		2013/2014		2014/2015		2015/2016	
Jumlah Lulusan	120	100%	73	100%	60	100%	101	100%	108	100%
Yang Melanjutkan	54	45%	43	59%	41	68%	65	64%	68	63%
Yang Tidak Melanjutkan	66	55%	30	41%	19	32%	36	36%	40	37%

Sumber: Rekapitulasi Lulusan SMPN 2 Wado Kab. Sumedang Tahun Pelajaran 2011/2012-2015/2016 (data diolah).

Tabel 1.2
Siswa Putus Sekolah Tahun Pelajaran 2012/2013 – 2015/2016
SMPN 2 Wado Kab. Sumedang

TAHUN PELAJARAN	KELAS			JUMLAH
	VII	VIII	IX	
2012/2013	3	2	3	8
2013/2014	8	4	2	14
2014/2015	4	3	0	7
2015/2016	2	2	1	5

Sumber: Daftar Mutasi Siswa SMPN 2 Wado 2012/2013 – 2015/2016 (data diolah).

Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa jumlah lulusan peserta didik SMPN 2 Wado dalam kurun waktu lima tahun terakhir

mengalami fluktuasi, baik dari segi peserta didik yang mampu dan yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi maupun peserta didik yang mengalami putus sekolah. Dari tabel tersebut, rata-rata 59,8% peserta didik dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan rata-rata lebih dari 40,2% peserta didik tidak mampu melanjutkan pendidikannya. Bahkan setiap tahunnya ada peserta didik yang mengalami putus sekolah dengan alasan yang sederhana, seperti kurangnya motivasi untuk bersekolah dan masalah ekonomi keluarga. Akibatnya peserta didik tersebut tidak memiliki keterampilan hidup yang memadai untuk bekerja dan berwirausaha, implikasinya adalah mereka menjadi pengangguran dan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah angka pengangguran khususnya di Kabupaten Sumedang. Tabel berikut ini menggambarkan jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Sumedang.

Tabel 1.3
Indikator Makro Ekonomi Kab. Sumedang

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
Penduduk (Jiwa)	1.151.919	1.165.804	1.198.837	1.282.988	1.307.648
Kemiskinan (%)	13,69	12,94	12,48	11,81	N/A
Pengangguran Terbuka (%)	9,76	7,9	8,04	7,48	N/A

Sumber : Profil Jawa Barat Tahun 2012, BPS Kab. Sumedang, BPMPP,DPE, DPU kab. Sumedang

Dalam tabel 1.3 memperlihatkan persentase jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Sumedang yang mencapai 7,48% dari total penduduk Kabupaten Sumedang atau setara dengan 97. 812 jiwa. Dan pada tahun 2015 sebanyak 17. 619 jiwa yang menganggur adalah lulusan SMP (BPS, 2015, hal. 153). Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran pemuda yang berusia produktif masih tinggi, hal ini disebabkan oleh salah satunya dari tingkat pendidikan yang masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan penciptaan lapangan kerja untuk memfasilitasi tenaga kerja produktif dalam memperoleh pekerjaan yang layak atau membekali dengan keterampilan dan keahlian wirausaha yang dapat menunjang kehidupan ekonomi masyarakat sekitar.

Sigit Widodo, 2017

PENGEMBANGAN SIKAP ECOPRENEURSHIP PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI PROJECT-BASED LEARNING

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Fenomena lainnya adalah tidak adanya lulusan SMP yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan peserta didik yang mengalami putus sekolah, melakukan aktivitas wirausaha. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Lestari dan Wijaya yang mengemukakan “fenomena rendahnya minat dan motivasi pemuda Indonesia untuk berwirausaha dewasa ini menjadi pemikiran serius berbagai pihak, baik pemerintah, dunia pendidikan, dunia industri, maupun masyarakat” (Lestari & Wijaya, 2012, hal. 113). Rendahnya minat dan motivasi dalam berwirausaha berimplikasi terhadap peningkatan jumlah pengangguran baik di Sumedang maupun di Indonesia, hal ini berdasarkan tabel *work and employment* dalam *human development report*, “Tingkat pengangguran pemuda yang berusia 15-24 tahun rentang tahun 2008-2014 mencapai 31,3% dari jumlah penduduk Indonesia” (UNDP, 2015, hal. 255). Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi terutama untuk mengantisipasi peserta didik yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan peserta didik yang mengalami putus sekolah sehingga peserta didik berminat dan termotivasi untuk berwirausaha agar di masa kini maupun di masa yang akan datang mereka akan berdaya secara ekonomi, mandiri dan yang paling utama adalah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat sekitar sekaligus mengurangi kontribusi terhadap peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia khususnya di Kabupaten Sumedang.

Fenomena lain selain peserta didik yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan peserta didik yang mengalami putus sekolah, rendahnya minat dan motivasi berwirausaha peserta didik yang mengalami hal-hal tersebut, yang berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah pengangguran, adalah kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Berdasarkan pengamatan penulis melalui dokumentasi pada tanggal 22 Agustus 2016, pada saat ini peserta didik kurang memperdulikan kebersihan lingkungannya. Hal ini ditandai dengan sikap mereka dalam membuang sampah. Sering dijumpai sampah-sampah berserakan di bawah meja dan di kolong meja peserta didik, kadang-kadang dibiarkan berhari-hari hingga membusuk sampai tercium aroma yang tidak sedap di tempat duduk peserta didik. Kondisi ini diperparah dengan sikap saling tuding peserta didik tentang pelaku yang suka

membuang sampah di bawah meja dan di kolong meja apabila dilakukan pengecekan kebersihan sampah di bawah meja dan di kolong meja oleh guru. Sikap peserta didik di luar kelas pun tidak jauh berbeda terutama dalam membuang dan memungut sampah. Peserta didik terlihat tidak peduli apabila sedang berjalan di luar kelas dan melihat sampah di depannya, mereka tidak berusaha memungut sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah, seolah-olah mereka tidak melihatnya. Hal ini ternyata sama dengan temuan Muhaimin dalam jurnalnya, yang menyatakan bahwa,

Dalam konteks faktual, pada umumnya sikap dan kepedulian terhadap lingkungan belum terbentuk sepenuhnya dalam diri siswa. Siswa belum berperilaku sesuai dengan yang diharapkan dalam pendidikan lingkungan hidup. Indikasi dalam beberapa hal adalah masih banyaknya lingkungan sekolah yang kotor, partisipasi siswa dalam kegiatan lingkungan yang masih rendah, belum adanya kesadaran siswa dalam membentuk perilaku lingkungan, perilaku boros dalam dalam penggunaan sumber daya alam, apatis terhadap pelestarian lingkungan sekitar siswa, dan sebagainya (Muhaimin, 2015, hal. 13).

Menyikapi fenomena tersebut, sekolah sebagai titik sentral pendidikan memiliki peran penting dalam membekali peserta didiknya dengan keterampilan hidup yang diperlukan terutama menyiapkan peserta didik untuk hidup mandiri, berdaya guna, berdaya saing secara ekonomi, sadar dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan muatan KTSP dalam panduan BSNP menyatakan bahwa “pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik” (BSNP, 2006, hal. 13). Selanjutnya dalam fungsi keterampilan sosial menurut Raven adalah ‘sebagai sarana untuk memperoleh hubungan yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain, contoh: melakukan penyelamatan lingkungan, membantu orang lain, kerja sama, mengambil keputusan, berkomunikasi, wirausaha, dan partisipasi’ (Wahyuti, 2015, hal. 26-27).

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dipaparkan, maka untuk memberdayakan peserta didik dalam menghadapi kehidupannya, sekolah dapat mengembangkan kemandirian peserta didik, sehingga peserta didik memiliki

sikap wirausaha sekaligus membentuk kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dengan memanfaatkan segala potensi yang terdapat di lingkungan sekitar peserta didik adalah mengenalkan dan mengembangkan sikap *ecopreneurship*. Singh dan Panackal dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa, “*It’s important to give ecopreneurship serious consideration because we are rapidly losing our natural resources—the true capital of any nation*” (Singh & Panackal, 2014, hal. 4). Setiap hari umat manusia kehilangan sumber daya alam sebagai modal utama setiap negara, dengan demikian menjadi hal yang sangat penting agar setiap negara memberikan perhatian serius terhadap *ecopreneurship* untuk mengurangi kehilangan sumber daya alam tersebut. Cohen and Winn (2007), mengemukakan bahwa ‘*ecopreneurs* memiliki potensi dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan dan secara berkesinambungan memperbaiki ekosistem bumi’ (McEwen, 2013, hal. 266). Masalah-masalah lingkungan dapat diselesaikan apabila adanya kesadaran dan kepedulian para entrepreneur terhadap lingkungan. “*Environmentalism can be understood only in terms of attitudes, it cannot be subsumed into, or understood in purely economic terms because of the power of the moral dimension. Entrepreneurship is primarily individualistic economic action, but it too can be driven by moral attitudes*” (Anderson, 1998, hal. 136-137). Lingkungan dan kewirausahaan, keduanya hanya dapat dipahami dan dibangun melalui sikap moral. Oleh karena itu, sikap wirausaha dan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan (*ecopreneurship*) perlu diajarkan sejak dini pada peserta didik sebagai calon-calon wirausahawan yang akan memberdayakan potensi lingkungan sekitarnya.

Pengembangan sikap *ecopreneurship* bertujuan untuk menanamkan sikap wirausaha dan kesadaran serta kepedulian terhadap lingkungan sejak dini agar peserta didik selain belajar untuk memberdayakan dirinya secara ekonomi juga memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat Petrin (1994) yang menyatakan bahwa ‘pada masyarakat pedesaan, *ecopreneurship* dapat memperbaiki kualitas kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan keberlangsungan lingkungan’ (Mbebeb, 2012, hal. 48). Pendapat tersebut

menegaskan bahwa sebagai masyarakat pedesaan, peserta didik dapat mengatasi masalah perekonomian dan lingkungannya di masa yang akan datang dengan *ecopreneurship*. Selanjutnya Mbebeb mengemukakan “*the present study hypothesizes that the deposition of ecological entrepreneurship depends on attitudes, social norms, self-efficacy, and the ability to control the entrepreneurial action*” (Mbebeb, 2012, hal. 45). *Ecopreneurship* bergantung pada sikap, norma sosial, efikasi diri, dan kemampuan untuk mengendalikan tindakan wirausaha. *Ecopreneurship* selalu berhubungan salah satunya adalah dengan sikap wirausaha terhadap lingkungannya. Sikap wirausaha yang peduli dengan lingkungan itulah yang dapat dikatakan sebagai sikap *ecopreneurship*. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk mengembangkan sikap *ecopreneurship* pada peserta didik melalui kegiatan pembelajaran agar peserta didik dapat memilih jalan hidupnya sebagai *ecopreneur*.

Pengembangan sikap *ecopreneurship* cocok diterapkan dalam pendidikan di SMP, karena hal ini sejalan dengan Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dalam lampirannya, Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B (2006, hal. 2-3) diantaranya yaitu, “menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya, memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab, menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya, dan menerapkan hidup bersih, sehat, bugur, aman, dan memanfaatkan waktu luang”.

Hal ini sejalan pula dengan Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs (2006, hal. 25), diantaranya adalah (1) “mengungkapkan gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi berupa kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi barang/jasa untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan; (2) mengidentifikasi upaya penanggulangan permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan”. Oleh karena itu, perlu di desain materi pembelajaran yang tepat dalam mendukung dan membekali peserta didik dengan sikap *ecopreneurship* yaitu materi-materi dalam pembelajaran IPS. “Seluruh konten studi sosial disajikan dengan pendekatan dan metode membentuk pengetahuan, keterampilan sosial dan akhirnya akan membentuk sikap dan kepribadian yang baik” (Hermanto, 2009, hal. 3).

Pembelajaran IPS membahas hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Peserta didik sebagai bagian dari masyarakat dan lingkungan selalu dihadapkan pada masalah-masalah yang cukup kompleks dan merupakan bagian dari dinamika kehidupannya. Materi IPS yang disajikan berkaitan dengan berbagai aktivitas manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks. “Mata pelajaran IPS mengkaji berbagai aspek kehidupan masyarakat secara terpadu, karena memang kehidupan masyarakat merupakan totalitas, integrasi, atau multidimensi dari berbagai aspek” (Maryani, 2011, hal. 1-2). Sedangkan Karaduman dan Gultekin (2010, hal. 100) mengemukakan bahwa “beberapa tujuan mata pelajaran IPS berasal dari prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivis yang menekankan keterlibatan emosi dan fisik secara efektif untuk mengembangkan sikap dan pandangannya terhadap dunia sosial (contoh tidak menilai sesuatu tanpa bukti yang rinci dan memadai)”.

“IPS harus mengembangkan berbagai kemampuan siswa secara terpadu baik kognitif, sikap dan nilai, keterampilan, dan aksi sosial” (Maftuh, 2010, hal. 25). Dari pendapat-pendapat tersebut maka IPS merupakan mata pelajaran yang berasal dari prinsip-prinsip konstruktivisme yang mengkaji berbagai aspek kehidupan masyarakat secara terpadu dan salah satunya bertujuan untuk mengembangkan sikap serta dalam menentukan sikap tersebut harus berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS dapat mendukung pengembangan sikap *ecopreneurship* peserta didik, agar sikap *ecopreneurship* ini dapat dikembangkan dengan baik maka pembelajaran IPS harus berbasis kehidupan nyata dan kondisi lingkungan tempat tinggal peserta didik. “Pembelajaran di sekolah tidak hanya difokuskan pada pemberian pembekalan kemampuan pengetahuan yang bersifat teoretis saja, akan tetapi bagaimana agar pengalaman belajar yang dimiliki siswa senantiasa terkait dengan permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di lingkungannya” (Susilana, 2006, hal. 146). Pembelajaran IPS dirancang sedemikian rupa dalam memfasilitasi peserta didik belajar sehingga pembelajaran menjadi bermakna, peserta didik akan mampu beradaptasi dan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada

dengan baik karena sesuai dengan kehidupan nyata yang dihadapi langsung peserta didik.

Lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik dapat menjadi bagian dalam pembelajaran IPS untuk mengembangkan sikap *ecopreneurship*. Dalam pembelajaran IPS ini, peserta didik dapat menggali berbagai potensi ekonomi di lingkungan tempat tinggalnya melalui kegiatan kunjungan ke industri-industri kecil seperti produksi tahu sumedang, pertanian ataupun perkebunan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sapriya (2012, hal 110) yang mengemukakan bahwa “Kehidupan riil dan masalah yang langsung terkait dengan siswa mempunyai kecenderungan mempertajam sikap dan kreativitas siswa”. Sedangkan Holubova (2008) menyatakan ‘*students have a chance to solve interdisciplinary problems by themselves and also they can response activities outside the school environment*’ (Panasan dan Nuangchalerm, 2010, hal. 253). Permasalahan yang langsung dengan kehidupan nyata dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya secara interdisipliner sehingga dapat meningkatkan sikap dan kreativitas peserta didik.

Dalam mengakomodasi pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar untuk mengembangkan sikap *ecopreneurship* peserta didik maka dalam pembelajaran IPS ini perlu menerapkan pembelajaran yang kontekstual. “Pembelajaran yang kontekstual diperlukan untuk menghubungkan antara materi pembelajaran dengan isu-isu lingkungan yang dekat dengan dunia nyata peserta didik” (Supriatna, 2016, hal. 23). Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran dengan menggunakan *project-based learning*. Cord (2001) dalam Rais (2010, hal. 247) menyatakan bahwa ‘*project-based learning* menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks’. *Project-based learning* merupakan pembelajaran yang kontekstual karena dalam implementasinya berhubungan dengan aktivitas nyata peserta didik melalui proyek-proyek yang melibatkan lingkungan sekitarnya. *Project-based learning* memiliki peran penting dalam mengembangkan kognitif peserta didik melalui aktivitas pengumpulan data, afeksi melalui kerjasama dalam penyelesaian proyek dan psikomotor melalui tugas proyek dalam menghasilkan sebuah produk. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa “*The students who were*

educated by project-based learning had developed more positive attitudes towards the lesson than the students who were educated by the instruction based on student textbooks” (Bas, 2011, hal. 10). “Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *project-based learning* memiliki pengaruh yang signifikan pada peserta didik seperti keterampilan pemecahan masalah, strategi metakognitif, dan sikap terhadap pembelajaran” (Thomas, 2000, hal. 18). Hasil penelitian Bas (2011) dan reviu Thomas (2000) menunjukkan bahwa *project-based learning* memiliki peran penting dalam mengembangkan sikap peserta didik terhadap pembelajaran bila dibandingkan dengan pembelajaran tradisional atau pembelajaran berbasis buku teks. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *project-based learning* dapat mengembangkan sikap peserta didik ke arah sikap yang positif sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran IPS untuk mengembangkan sikap *ecopreneurship* peserta didik.

Suratno et al menyatakan bahwa ‘*project-based learning* merupakan suatu pendekatan pengajaran yang dikembangkan berdasarkan prinsip konstruktivisme, *problem solving*, *inquiry-riset*, *integrated studies* dan refleksi yang menekankan pada aspek kajian teoretis dan aplikasinya’ (Sudarya, 2008, hal. 1). Prinsip pembelajaran dalam *project-based learning* menggunakan prinsip konstruktivisme, maksudnya peserta didik mengkonstruksi secara mandiri pengetahuannya berdasarkan tugas-tugas proyek yang dikerjakannya. Tugas-tugas proyek tersebut dapat berupa pemecahan masalah, inkuiri, penemuan (*discovery*) baik itu dilaksanakan di dalam kelas ataupun di luar kelas. *Integrated studies* dalam pendapat ini dapat diinterpretasikan sebagai pembelajaran yang terintegrasi dari berbagai disiplin ilmu, sehingga dalam *project-based learning* peserta didik dapat mengintegrasikan dan mengaplikasikan berbagai pengetahuan yang dimilikinya melalui tugas proyek yang akan dikerjakannya. Berdasarkan hasil penelitian Munawaroh, Subali, dan Sopyan (2012, hal. 36-37) yang menyimpulkan bahwa,

Project-based learning mampu meningkatkan motivasi siswa sehingga hampir semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran (*learning to do*). Hampir semua siswa bekerja secara kelompok dengan baik tanpa memperdulikan kemampuan kognitif dan jenis kelamin (*learning to live together*), sehingga pembahasan laporan kegiatan menggunakan model

Project-based learning lebih lengkap (*learning to be*) dibandingkan pembelajaran kooperatif.

Penerapan *project-based learning* salah satunya dapat mengembangkan sikap peserta didik karena model pembelajaran tersebut melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan mengikuti tahapan-tahapan pembelajaran dari mulai perencanaan sampai proses evaluasi. Sesuai dengan Permendikbud No. 22 tahun 2016 yang mengemukakan bahwa “sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas tersebut” (Depdikbud, 2016, hal. 11). Dengan demikian, *project-based learning* merupakan pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman sebayanya dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajarnya sehingga diperoleh pengetahuan baru dan sikap berdasarkan pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian pembelajaran akan lebih bermakna dan menyenangkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah penelitian eksperimen semu dengan mengambil judul “Pengembangan Sikap *Ecopreneurship* Peserta Didik dalam Pembelajaran IPS melalui *Project-based Learning*” (Penelitian Eksperimen Semu di Kelas VII SMPN 2 Wado Kabupaten Sumedang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan sikap *ecopreneurship* peserta didik yang signifikan dalam pembelajaran IPS antara sebelum (pengukuran awal/pretes) dan sesudah (pengukuran akhir/postes) menerapkan *project-based learning* pada kelas eksperimen?
2. Apakah terdapat peningkatan sikap *ecopreneurship* peserta didik dalam pembelajaran IPS pada kelas eksperimen yang menerapkan *project-based learning*?

3. Apakah terdapat perbedaan sikap *ecopreneurship* peserta didik yang signifikan dalam pembelajaran IPS antara sebelum (pengukuran awal/pretes) dan sesudah (pengukuran akhir/postes) menerapkan metode ceramah pada kelas kontrol?
4. Apakah terdapat peningkatan sikap *ecopreneurship* peserta didik dalam pembelajaran IPS pada kelas kontrol yang menerapkan metode ceramah?
5. Apakah terdapat perbedaan sikap *ecopreneurship* peserta didik yang signifikan dalam pembelajaran IPS antara kelas eksperimen setelah menerapkan *project-based learning* dengan kelas kontrol yang menerapkan metode ceramah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan sikap *ecopreneurship* peserta didik yang signifikan dalam pembelajaran IPS antara sebelum (pengukuran awal/pretes) dan sesudah (pengukuran akhir/postes) menerapkan *project-based learning* pada kelas eksperimen.
2. Untuk mengetahui peningkatan sikap *ecopreneurship* peserta didik dalam pembelajaran IPS pada kelas eksperimen yang menerapkan *project-based learning*.
3. Untuk mengetahui perbedaan sikap *ecopreneurship* peserta didik dalam pembelajaran IPS antara sebelum (pengukuran awal/pretes) dan sesudah (pengukuran akhir/postes) menerapkan metode ceramah pada kelas kontrol.
4. Untuk mengetahui peningkatan sikap *ecopreneurship* peserta didik dalam pembelajaran IPS pada kelas kontrol yang menerapkan metode ceramah.
5. Untuk mengetahui perbedaan sikap *ecopreneurship* peserta yang signifikan didik dalam pembelajaran IPS antara kelas eksperimen yang menerapkan *project-based learning* dengan kelas kontrol yang menerapkan metode ceramah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti setelah melaksanakan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat bagi peserta didik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pengembangan sikap *ecopreneurship* peserta didik melalui pembelajaran IPS.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan minat peserta didik dalam pembelajaran IPS.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengalaman belajar yang lebih bermakna (*meaningfull*) karena peserta didik dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran IPS melalui kegiatan lapangan yang bersumber dari lingkungan peserta didik sendiri sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Manfaat bagi Guru
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) terutama dalam mengembangkan sikap *ecopreneurship*.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di kelas sehingga dapat meningkatkan minat, motivasi dan partisipasi aktif peserta didik.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru dalam pembelajaran IPS.
 - d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman guru dalam menerapkan model-model pembelajaran IPS.
3. Manfaat bagi Sekolah/Lembaga
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SMPN 2 Wado Kabupaten Sumedang khususnya dalam mata pelajaran IPS.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menerapkan model-model pembelajaran yang berbasis lingkungan sekitar peserta didik.

E. Struktur Organisasi Tesis

Adapun sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
Bab pendahuluan ini terdiri dari lima sub bab antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.
- Bab II Kajian Pustaka
Bab kajian pustaka memiliki enam sub bab, dan dari setiap sub bab terdapat sub-sub bab. Sub bab dan sub-sub bab tersebut antara lain: Sikap *ecopreneurship* memiliki sub-sub bab antara lain: definisi sikap, ciri-ciri sikap, komponen sikap, pembentukan dan perubahan sikap, fungsi sikap, definisi *ecopreneurship*, karakteristik *ecopreneurship*, kerangka *ecopreneurship*. Pembelajaran IPS memiliki sub-sub bab antara lain: definisi pembelajaran, definisi IPS, dan Tujuan IPS. *Project-based Learning* terdiri dari sub-sub bab antara lain: definisi *project-based learning*, prinsip-prinsip *project-based learning*, karakteristik *project-based learning*, langkah-langkah dalam *project-based learning*. Sedangkan kerangka pemikiran, hasil penelitian sebelumnya dan hipotesis tidak memiliki sub-sub bab.
- Bab III Metode Penelitian
Bab metode penelitian terdiri dari beberapa sub bab antara lain desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian terdiri dari sub-sub bab definisi operasional dan teknik pengumpulan data, sub bab prosedur penelitian, dan analisis data.
- Bab IV Temuan dan Pembahasan
Bab temuan dan pembahasan terdiri dari sub bab deskripsi objek penelitian dengan sub-sub bab, yaitu lokasi, visi dan misi, keadan peserta didik, data pendidik dan tenaga kependidikan serta pelaksanaan penelitian. Sub bab deskripsi keterlaksanaan pembelajaran IPS, terdiri dari sub-sub bab antara lain: pembelajaran IPS dengan menerapkan *project-based learning*, deskripsi keterlaksanaan sintaks *project-based learning*, dan tanggapan peserta didik terhadap penerapan *project-based learning*. Sub bab sikap *ecopreneurship* terdiri dari sub-sub bab antara lain: sikap *ecopreneurship* peserta didik pada

kelas eksperimen, sikap *ecopreneurship* peserta didik pada kelas kontrol, perbedaan sikap *ecopreneurship* peserta didik antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol (sebelum perlakuan), dan perbedaan sikap *ecopreneurship* peserta didik antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol (setelah perlakuan). Dan terakhir adalah Sub bab pembahasan.

- Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Bab simpulan, implikasi, dan rekomendasi terdiri dari sub bab simpulan, implikasi dan rekomendasi.